



BERKALA PERIKANAN TERUBUK

Volume. 38 No. 1

Februari 2010

Distribusi Makrozoobenthos Di Perairan Aek Manis Kabupaten Sibolga Sumatera Utara Irvina Nurrachmi, Zulkifli, Esra Waty	1-7
Pangsa Pasar Dan Efisiensi Pemasaran Ikan Jambal Siam Dari Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar Tince Sofyani	8 - 22
Strategi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Indragiri Hilir (<i>Studi Kasus Kawasan Panglima Raja Kecamatan Concong</i>) Zulkarnain dan Amrizal	23 - 38
Identifikasi Dan Inventarisasi Ikan-Ikan Dari Waduk PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar, Riau Sampe Harahap, Syafriadiman dan Eryan Huri	39 - 47
Pengorganisasian dan analisis usaha perikanan keramba di waduk PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar Tibrani dan Tince Sofyani	48-61
Potensi Penggunaan Acepromazine Sebagai Sediaan Transquilizer Pada Transportasi Ikan Patin Andriyanto, A. Sutisna, W. Manalu, L. Andini, R. Hidayat, K. Suanda, S. Valinata	62 - 70
Pengaruh Suhu Terhadap Kelangsungan Hidup Dan Pertumbuhan Larva Ikan Mas (<i>Cyprinus carpio</i>) Dominggas M. Kelabora	71 - 81
Studi Bahan Dan Konstruksi Kapal Perikanan Jaring Insang Di Kota Dumai, Propinsi Riau Jonny Zain	82 - 94
Toksitasitas Limbah Cair Minyak Kelapa Sawit Dan Uji Sub Lethal Terhadap Ikan Nila (<i>Oreochromis sp.</i>) Syafriadiman	95-106
Domestikasi Dan Pematangan Gonad Ikan Tapah (<i>wallago sp</i>) Dari Perairan Sungai Kampar, Riau Yurisman , Sukendi dan Ridwan Manda Putra	107-117

Jurnal Penelitian	Volume. 38	No.1	Halaman 1-117	Pekanbaru, Februari 2010	ISSN 126-4265
-------------------	------------	------	---------------	--------------------------	---------------

Diterbitkan Oleh:
**HIMPUNAN ALUMNI
 FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
 UNIVERSITAS RIAU**

**STRATEGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR BERBASIS
MASYARAKAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
(Studi Kasus Kawasan Panglima Raja Kecamatan Concong)**

By

Zulkarnain¹⁾ dan Amrizal¹⁾

Diterima: 12 Oktober 2009 / Disetujui: 27 Oktober 2009

ABSTRACT

The research was conducted on July to August 2008, it was aimed to know the characteristics of fishermen in Panglima Raja Indragiri Hilir Regency and to identification and description about strategy on coastal resources management in Panglima Raja Indragiri Hilir Regency. The reserach was using by grounded research as the same case study method.

The result of this research was concluded, the social economy condition of fishermen in Panglima Raja among of them depend on fishing activities, low education in elementary school only. The culture among of them is Duano Community, their activities depend on the sea, the house is called "Kajang" and then there are malay culture in coastal zone these is knowing in religion and nationalism celebrate.

The strategy on coastal resources management based community in Panglima Raja was compiled that are : Strategy of institution development, Strategy of accompanying, research and training, Strategy of infrastructure development and environmental management, Strategy of generating income development and Strategy of marketing acces development of fisheries product.

Keywords: characteristics of fishermen, coastal resources management, Duano Community

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Paradigma pembangunan nasional telah berubah dari kebijakan yang sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan ini merupakan konsekuensi logis setelah lahirnya Undang-undang (UU) No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya telah dirubah menjadi

UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 34 Tahun 2004.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari kegiatan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, masyarakat di Kabupaten/Kota diberikan kesempatan mengatur diri sendiri melalui *local self goverment* dan melaksanakan pembangunan sesuai karakteristik daerah (kondisi geografis, sumberdaya alam dan sosial budaya masyarakat) masing-masing. Oleh sebab itu jika setiap daerah berketetapan hati

¹⁾ Staf Pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau Pekanbaru

memfokuskan untuk membangun perekonomian daerah, maka tidak ada alternatif lain kecuali membangun perekonomian yang berbasis pada sumberdaya lokal.

Selama pemerintahan orde baru kegiatan pembangunan perikanan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah kurang mendapat perhatian, hal ini terlihat bahwa belum adanya departemen atau dinas khusus yang menangani pembangunan perikanan. Pembangunan yang selama ini cenderung berpihak pada pembangunan fisik dan pertumbuhan lebih diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi sumberdaya alam di darat. Pembangunan tersebut kurang memperhatikan pendayagunaan sumberdaya kelautan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang hidupnya tergantung pada pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir (Dirjen UP3K, 2000)

Kebijakan pengembangan kawasan pesisir yang telah dilaksanakan sejak pemerintah orde baru juga terindikasi masih bersifat parsial dan direncanakan dari atas (*top down*). Hal ini dapat terlihat dari berbagai program pembangunan pesisir yang hanya mementingkan beberapa aspek saja dan belum terpadu, sehingga seringkali kurang atau bahkan tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal. Boleh dikatakan bahwa strategi pembangunan pesisir selama ini masih belum berdasarkan sistem pembangunan partisipatif dan kurang mendayagunakan potensi masyarakat secara terpadu, dengan demikian kebijakan tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkannya sehingga sebagian besar masyarakat nelayan

masih hidup dalam keadaan miskin. (Dirjen UP3K, 2000).

Pengelolaan sumberdaya perikanan (*fisheries management*) merupakan upaya penting dalam menjaga kesinambungan sumberdaya (*sustainability*). Hal ini dimaksudkan agar tidak hanya generasi sekarang yang dapat menikmati kekayaan sumberdaya, tetapi juga generasi mendatang (Satria, 2002).

Karakteristik sumberdaya alam yang bersifat terbuka (*open acces*), karakteristik wilayah yang berupa lautan, dan karakteristik masyarakat yang berada pada berbagai level sosial-ekonomi membutuhkan pengelolaan yang relatif lebih rumit dan kompleks, dibandingkan dengan pengelolaan sumberdaya alam lainnya. Indonesia dengan wilayah laut yang luas, atau lebih khusus lagi adalah daerah-daerah yang berkarakteristik kepulauan harus mampu menciptakan pengelolaan sumberdaya laut yang tepat.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah yang memiliki karakteristik wilayah perairan laut lebih dominan dan berbatasan dengan banyak kabupaten, provinsi, atau bahkan negara lain. Kondisi geografis seperti ini sangat rentan akan masalah-masalah kerusakan lingkungan perairan laut terutama oleh aktifitas *illegal fishing*. Keterlibatan semua pihak dalam menjaga kelestarian laut menjadi sangat dibutuhkan, terutama oleh *primery stakeholder* yaitu masyarakat dan pemerintah.

Rumusan Masalah

Pengelolaan sumberdaya perikanan (*fisheries resources management*) merupakan upaya penting dalam menjaga

kesinambungan sumberdaya (*sustainability*). Namun selama ini pengelolaan sumberdaya laut berpusat pada pemerintah, sehingga dalam prakteknya mengalami kegagalan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian tentang program pengembangan perikanan di Kabupaten Indragiri Hilir, diantaranya:

1. Bagaimana karakteristik masyarakat atau nelayan di Pesisir Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Strategi apa saja yang dilaksanakan terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir di Kawasan Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana strategi pengelolaan sumberdaya pesisir di Kawasan Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kajian terhadap 2 sasaran pokok yaitu:

1. Mengetahui karakteristik masyarakat atau nelayan di kawasan Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir .
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang strategi pengelolaan Sumberdaya pesisir di Kawasan Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir.

Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan :

1. Memberikan kontribusi kepada pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan, Masyarakat dan seluruh

Stakeholders dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir

2. Sehubungan dengan program otonomi desa di Propinsi Riau dalam mewujudkan Visi Riau 2020 maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada seluruh *Stakeholders*
3. Sebagai gambaran dan referensi bagi pembangunan wilayah pesisir secara nasional terutama pembangunan wilayah pesisir yang berbasis potensi dan budaya masyarakat lokal.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kawasan Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Kepulauan Riau pada tanggal 12 Juli hingga 12 Agustus 2008.

Metode Penelitian

Pengelolaan sumberdaya pesisir pada suatu daerah akan berbeda dengan daerah lain, karena kondisi-kondisi faktor-faktor yang mempengaruhinya juga berbeda-beda. Faktor-faktor yang membedakan dan sangat mempengaruhi adalah karakteristik sumberdaya alam yang dimiliki masing-masing daerah serta kultur dan sosial ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Menurut Yin (2003) mendefinisikan studi kasus sebagai suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konstek kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak

dengan tegas dan multi sumber bukti dimanfaatkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tergolong metode penelitian deskriptif dan kualitatif. Alasan yang mendasari penelitian ini sebagai penelitian kualitatif adalah karena penelitian ini lebih banyak mengkaji dari proses dinamika masyarakat yang mempengaruhi pola pengelolaan sumberdaya laut di daerah ini

Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dibutuhkan karena bersentuhan dengan kondisi yang sebenarnya. Sementara data sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk mempertegas data primer yang diperoleh sehingga tingkat pembiasan data semakin kecil.

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan bersifat kuantitatif.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan dengan semua informan dengan cara dan suasana yang berbeda-beda. Peneliti menyesuaikan gaya bahasa berdasarkan tingkat pemahaman informan, sehingga informan mudah mengerti maksud dari pertanyaan yang diajukan.

Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari informan-informan yang berasal dari berbagai kalangan mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat hingga nelayan setempat. Informan ditentukan secara *accidental* (kebetulan) dan *snowballing*.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, hal ini sangat diperlukan untuk menentukan arah kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya laut yang berbasiskan kepada kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan panduan analisis data dari Maleong (2000), maka disusun tahap pengolahan dan analisis data yaitu ; (1) telaah data dan informasi dari berbagai sumber hasil wawancara, observasi dan dokumen, (2) Reduksi data informasi dengan membuat abstraksi sebagai rangkuman inti dari semua pernyataan sehingga tetap ada (3) menyusun data dan informasi dalam satuan-satuan, (4) mengkategorikan data dan informasi, (5) mengecek keabsahan data dan informasi, dengan cara mengkonfrimasi kembali setiap data dan informasi yang diperoleh. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif (studi kasus).

Untuk menentukan strategi pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat dilakukan analisis deskriptif dengan melakukan identifikasi potensi, permasalahan dan masalah prioritas terhadap data primer maupun data sekunder baik kualitatif maupun kuantitatif.

Untuk merumuskan berbagai strategi tersebut dibuat dalam matriks analisis peran stakeholders, analisis identifikasi masalah dan analisis masalah prioritas, kemudian dirumuskan alternatif strategi yang didapat dari hasil penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Potensi

Dari hasil wawancara mendalam terhadap pemuka masyarakat,

pelaksana teknis dan pejabat teknis sebagai *stakeholders* diperoleh beberapa pandangan terhadap potensi pengelolaan sumberdaya perikanan yaitu :

- a. Desa Panglima Raja memiliki potensi perikanan yang besar dan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, namun pengelolaan yang dijalankan selama ini secara teknis belum benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masih bersifat tradisional. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan dilakukan kurang memperhatikan sumberdaya manusia, untuk itu diperlukan model pengelolaan yang menggerakkan ekonomi masyarakat, bersifat mendidik, mengikutsertakan dan memberdayakan masyarakat.
- b. Pemanfaatan potensi perikanan hanya terbatas pada usaha penangkapan sehingga masyarakat ketergantungan dengan kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan ini memerlukan modal yang besar untuk mengembangkannya. Untuk itu pengembangan pengembangan usaha alternatif melalui pembentukan dan pembinaan kelembagaan masyarakat.
- c. Pemasaran hasil produksi belum lancar karena terbatasnya sarana dan prasarana, belum adanya wadah yang dapat mengkoordinir lembaga ekonomi yang ada sehingga tingkat harga rendah bahkan dibiarkan mengambang sehingga masih tergantung dengan tauke.
- d. Hubungan antara tauke dan nelayan memiliki hubungan erat (*patron client relationship*), hubungan ini dapat dikembangkan untuk pengembangan kelembagaan nelayan yang mengikutsertakan peran tauke.
- e. Pengelolaan sumberdaya perikanan harus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat dengan menggerakkan masyarakat sebagai subjek pembangunan bukan objek dari pembangunan tersebut.
- f. Pengelolaan sumberdaya perikanan harus didasarkan pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat, yang erat kaitannya dengan potensi sosial ekonomi perikanan yang ada di desa Panglima Raja.
- g. Pengelolaan sumberdaya perikanan memerlukan kerja keras semua pihak (*multi stakeholders*) perlu dilakukan dengan pengembangan potensi sumberdaya yang ada di daerah dan pola yang diusulkan adalah pola pemberdayaan sumberdaya masyarakat nelayan.
- h. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 desa sebagai suatu pemerintahan otonomi mempunyai kewenangan luas untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli desa terutama kewenangan luas untuk mengelola potensi sumberdaya secara optimal untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
- i. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap *stakeholders* maka pengelolaan sumberdaya perikanan perlu dilaksanakan secara terpadu yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Identifikasi terhadap peran sumberdaya perikanan dapat *stakeholders* mengenai pengelolaan disajikan seperti Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Peran *Stakeholders* dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa Panglima Raja

<i>Stakeholders</i>	Netral	Mendukung
1. Institusi teknis (Diskanlut Indragiri Hilir)	-	√
2. Kepala Desa	-	√
3. Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)	-	√
4. Tokoh Masyarakat	-	√

Sumber : Hasil Diskusi dengan Stakeholders

Dukungan semua pihak dalam suatu kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Hal ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan pembangunan yang telah diimplementasikan, karena jika dukungan tidak didapatkan, maka kegiatan pembangunan menjadi tidak bermakna dan boleh dikatakan bahwa

kegiatan yang dilaksanakan menjadi sia-sia.

Identifikasi Masalah dan Analisis Masalah Prioritas

Berikut beberapa identifikasi permasalahan pengembangan perikanan di Desa Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2. Masalah dalam pengembangan perikanan di Desa Panglima Raja

<i>Stakeholders</i>	Masalah	Sebab-Sebab
Dinas Perikanan - Pejabat Teknis - Pelaksana teknis	Lemahnya Struktur kelembagaan nelayan sebagai sasaran pembangunan Ketergantungan terhadap tauke karena nelayan tidak memiliki sarana penangkapan yang lengkap Terbatasnya kemampuan nelayan mengelola usaha secara mandiri Lemahnya pengawasan terhadap kegiatan sosial ekonomi dan kelembagaan nelayan Pengembangan budidaya perikanan dan kegiatan pasca panen seperti pengolahan hasil perikanan belum menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh masyarakat	a. Rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia (Pendidikan Nelayan) b. Rendahnya komitmen para <i>Stakeholders</i> c. Lemahnya fungsi kelembagaan yang telah dibentuk d. Tingginya ketergantungan dengan laut dan tradisi turun temurun

Pemuka Masyarakat - BPD - Tokoh Adat - Pemerintah Desa	Pengembangan perikanan yang ada belum mampu meningkatkan kesejahteraan secara umum Keperluan nelayan belum terpenuhi secara menyeluruh Ketergantungan dengan tauke	a. Rendahnya kesadaran dalam pengelolaan keuangan (boros) b. Pembangunan infrastruktur nelayan belum berdasarkan skala prioritas c. Rendahnya pendidikan d. Lemahnya akses pemasaran hasil produksi perikanan
-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : Hasil Diskusi dengan Stakeholders

Pemecahan pada akar masalah adalah langkah selanjutnya dalam melihat suatu masalah. Akibat masalah tidak berdiri sendiri, maka pilihan langkah strategis yang dilakukan dalam diskusi ini adalah menentukan masalah strategis diantara banyak pilihan masalah yang harus diatasi.

Dari masalah-masalah yang dikemukakan oleh *stakeholders*, diputuskan bahwa masalah strategis yang dipilih menjadi prioritas untuk segera dicari jalan pemecahannya adalah strategi terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan. Masyarakat menilai bahwa masalah pengelolaan sumberdaya perikanan selama ini

belum dapat menunjang ekonomi masyarakat secara berkesinambungan menyangkut masa depan untuk dapat hidup layak seperti masyarakat di daerah lain. Apabila masalah ini teratasi maka masalah lainnya akan ikut teratasi.

Tindakan strategis yang mereka usulkan untuk diambil dalam mengatasi masalah strategis adalah dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dengan strategi yang terpadu mencakup seluruh aspek mental dan spiritual seluruh *stakeholder*. Tindakan strategis ini agar dilakukan secara terpadu sebagaimana yang terlihat pada Tabel 3

Tabel 3. Masalah dan Tindakan Strategis dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa Panglima Raja

Masalah Strategis	Tindakan Strategis
Pengelolaan sumberdaya perikanan yang ada masih berdampak parsial terhadap kehidupan masyarakat nelayan	a. Pembentukan dan pembinaan kelembagaan b. Pengembangan kegiatan untuk mata pencaharian alternatif c. Pendampingan nelayan, Penelitian, Pelatihan dan Studi banding d. Pengembangan Infrastruktur e. Pengelolaan lingkungan f. Pengembangan dan peningkatan aspek pemasaran hasil perikanan

Sumber : Hasil Diskusi dengan Stakeholders

Tujuan yang ingin dicapai dalam FGD adalah merumuskan strategi pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa Panglima Raja yang berbasis masyarakat untuk menyelaraskan dan mensinkronisasikan antara keinginan masyarakat dengan yang telah dinas teknis kabupaten. Metode yang digunakan dalam FGD kabupaten adalah partisipatif dari peserta.

Dari diskusi yang dilakukan, diperoleh berbagai masukan dalam rangka merumuskan strategi pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa Panglima Raja Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan :

”Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan masyarakat pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir adalah keterisolasian kawasan sentra produksi, ketergantungan dengan tengkulak cukup tinggi, penggunaan teknologi yang rendah, usaha masih bersifat subsistence, manajemen usaha bersifat kekeluargaan, lemah dalam penyerapan teknologi baru sehingga berbagai program yang diluncurkan kepada masyarakat seringkali tidak tercapai seperti yang diharapkan. Untuk itu pengembangan perikanan yang potensi dikembangkan adalah pembangunan infrastruktur pendukung usaha nelayan

berdasarkan prioritas kebutuhan nelayan seperti usaha budidaya ikan/udang, pemanfaatan hasil tangkapan sampingan, usaha pengolahan hasil tangkapan khususnya jenis ikan kurang ekonomis seperti terasi, ikan kering dan produk turunan seperti kerupuk. Strategi pemberdayaannya adalah pembinaan dalam bentuk kelompok, menumbuhkan dan mendekatkan kelembagaan penyedia sarana produksi, membuka akses pemasaran dan permodalan, diversifikasi usaha pengolahan”

Senada dengan yang dikemukakan oleh pemuka masyarakat melalui wawancara dan diskusi yaitu Bapak Mantan, beliau menyatakan :

“...betul pak, dalam pengelolaan perikanan ni pak.. ntah ape name nye... yang jelas kami disodorkan berbagai program pemerintah dan kami sangat menyambut baik, setelah menjadi bagian dari kegiatan selama ini, kami memang merasakan adanya dampak baik terhadap pendapatan kami.... dulu pak... sebelum kegiatan ini ade kami teruk pak (red: susah Pak) sekarang ni lumayan lah pendapatan kami sedikit membaik, tapi kehidupan kami masih

belum berubah... maksudnya kami ni masih miskin pak... anak-anak kami nak sekolahpun payah, pengeluaran rumah tangga kami cukup sehari saje, besok dah tak ade lagi.... kalu dicakup sejahtera, kami masih jauh pak...

Pihak pelaksana teknis menyatakan :

"...pengelolaan yang dijalankan selama ini belum optimal memanfaatkan potensi sumberdaya lokal. Hal ini menyebabkan terindikasi bahwa kemampuan dan keberhasilan sangat lambat dirasakan. Untuk itu perlu dilaksanakan dengan melibatkan kesadaran dan pengawasan dari semua pihak secara maksimal, strategi yang dijalankan adalah pengkajian potensi dan pembinaan kelembagaan dari semua pihak yang terlibat..."

selanjutnya Lembaga Swadaya Masyarakat menyatakan :

"...bahwa permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program pembangunan baik itu pembangunan sektor perikanan untuk mencapai peningkatan ekonomi yang melibatkan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sumberdaya manusia yang belum

mampu untuk mengentaskan jumlah penduduk miskin, kesadaran masyarakat untuk merubah hidup kurang dan ketergantungan dengan cara-cara pendahulu mereka". Selanjutnya dikemukakan "bahwa perlu identifikasi potensi usaha ekonomi produktif yang ada di masyarakat. Jenis usaha ekonomi produktif yang potensi dikembangkan adalah kelompok usaha bersama, industri rumah tangga dengan model strategi pemberdayaan yaitu pembinaan dan pelatihan yang di dampingi oleh PPL.

Hasil diskusi di atas dapat diartikan bahwa kegiatan pengembangan masyarakat di Desa Panglima Raja khususnya, dan di Kabupaten Indragiri Hilir secara umum masih mempunyai berbagai masalah yang perlu dibenahi dan diupayakan perbaikan-perbaikan bagi terwujudnya pembangunan perikanan yang mampu mensejahterakan masyarakat banyak.

Berdasarkan pendapat yang berkembang dalam diskusi diambil kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

- a. Untuk kebutuhan penanggulangan permasalahan masyarakat di daerah, perlu dilakukan pendataan dan pengkajian melalui penelitian potensi karakteristik sosial ekonomi masyarakat sebagai sasaran yang disesuaikan dengan

- ketersediaan potensi sumberdaya daerah.
- b. Penanggulangan permasalahan pengelolaan sumberdaya perikanan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan kelompok usaha bersama.
 - c. Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang akan dikembangkan disesuaikan dengan potensi desa.
 - d. Diperlukan pendampingan dan pengawasan dari penyuluh lapangan.
 - e. Diperlukan penguatan infrastruktur dengan pengelolaan lingkungan lestari
 - f. Pembinaan dan pelatihan masyarakat perlu dilakukan agar masyarakat mampu mandiri dan mengerti.
 - g. Perlunya kejelasan hukum yang legal bagi masyarakat.
 - h. Perlunya pengembangan distribusi aspek pemasaran hasil perikanan.
 - i. Diperlukan kerjasama seluruh *stakeholders* dalam implementasi kegiatan.
 - j. Masyarakat sebagai objek kegiatan perlu sekaligus menjadi subjek kegiatan.

Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Desa Panglima Raja

Berdasarkan pendapat yang berkembang dalam diskusi penelitian diambil kesepakatan sebagai berikut :

Pengelolaan perlu dilaksanakan strategi secara terpadu, sehingga kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Untuk itu berdasarkan hasil kajian dan masalah pengelolaan sumberdaya perikanan, maka dapat dirumuskan beberapa strategi pengelolaan sumberdaya perikanan

bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil pemetaan wilayah pesisir sebagai sasaran pengelolaan sumberdaya perikanan dan dikuatkan dengan hasil diskusi tingkat desa (*PRA*) dan diskusi tingkat kabupaten (*FGD*), maka strategi pengelolaan sumberdaya perikanan dilakukan melalui pendekatan pembukaan isolasi wilayah, pembangunan prasarana dan pemberdayaan kelompok masyarakat. strategi ini diterapkan melalui pelaksanaan 4 (empat) yaitu: a) pembentukan dan pembinaan kelembagaan dengan mengedepankan budaya lokal; b) pendampingan, penelitian dan pelatihan; c) pengembangan prasarana infrastruktur dan pengelolaan lingkungan; d) pengembangan usaha alternatif selain melakukan penangkapan; e) pengembangan dan peningkatan aspek pemasaran hasil perikanan

Strategi Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan dengan memperhatikan budaya lokal

Kelembagaan merupakan aspek penting dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Pelaksanaan strategi kelembagaan masyarakat pada umumnya selama ini hanya sebatas pengembangan kelembagaannya saja dan cenderung tidak mengikutkan potensi budaya lokal, kelembagaan yang dibentuk seringkali lepas dari pembinaan sehingga kegiatan kelembagaan menjadi tidak terkontrol bahkan gagal, maka untuk menghindari kegagalan dan agar terkontrolnya kegiatan kelembagaan nelayan perlu dirancang strategi pengembangan dan pembinaan kelembagaan nelayan secara terstruktur dengan memperhatikan budaya lokal.

Kegiatan kelembagaan yang terstruktur mampu menjadi faktor pendukung masyarakat dalam melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari. Kelembagaan nelayan perlu melakukan terobosan kegiatan seperti peningkatan akses antar kelembagaan nelayan, pengolahan hasil tangkapan, penampungan produk perikanan, pengembangan kegiatan mata pencaharian tambahan selain melakukan penangkapan ikan.

Selanjutnya diperlukan perluasan kesempatan kerja meliputi program-a) peningkatan kualitas pengelolaan usaha; b) peningkatan keterampilan tenaga kerja. perluasan kesempatan berusaha melalui pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagai lembaga ekonomi produktif yaitu a) pengembangan kewirausahaan usaha kecil; b) pelatihan usaha kecil baru, c) pemberdayaan usaha budidaya selain penangkapan.

Strategi pendampingan, penelitian dan pelatihan

Pengembangan perikanan agar menjadi lebih baik maka perlu mengetahui keberadaan sumberdaya perikanan dan keberadaan masyarakat maka perlu dilakukannya penelitian, kemudian masyarakat dilakukan pendampingan dan pelatihan.

Strategi pengembangan melalui pendampingan, penelitian dan pelatihan perlu dilanjutkan dengan pelaksanaan secara terpadu sehingga memberikan hasil pada aspek jasmani dan rohani masyarakat. Maka kegiatan yang dilaksanakan yaitu: (1) penelitian tentang penilaian potensi sosial ekonomi masyarakat; (2) Penelitian tentang kehidupan agama dan sikap dan budaya masyarakat. Kegiatan ini

diserahkan kepada lembaga akademisi, untuk mengetahui ketepatan dan kemampuan masyarakat sebagai sasaran program.

Kemudian pelaksanaan pembinaan melalui pelatihan dirancang kegiatan masyarakat yang mengedepankan aspek pembinaan mental spritual sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dijalankan mampu berdasarkan rasa tanggung jawab, kesadaran dan keperluan masyarakat.

Strategi pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat

Pengembangan infrastruktur merupakan bagian penting sebagai sarana pendukung kegiatan nelayan, infrastruktur yang lengkap dan keberadaannya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan akan mampu memberikan nilai tambah yang baik bagi kehidupan masyarakat nelayan.

Kebijakan strategis pengembangan prasarana infrastruktur yang memberdayakan masyarakat meliputi peningkatan prasarana kelembagaan nelayan, prasarana ekonomi dengan peningkatan infrastruktur pendukung usaha seperti pembangunan tempat pendaratan hasil produksi, penyediaan alat tangkap, prasarana industri kecil untuk pengolahan hasil produksi (pabrik es mini, mesin penggiling ikan dan lainnya) dan prasarana tak kalah pentingnya adalah perhubungan untuk membuka daerah yang masih terisolir (sulit transportasinya). Kebijakan ini diambil karena peningkatan pengembangan prasarana infrastruktur dapat mengurangi keterisolasian daerah, dan mampu

berdampak pada akses ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial budaya masyarakat.

Keberadaan infrastruktur perlu disertai dengan pengelolaan lingkungan yang baik, karena hal ini akan mampu memberikan dukungan bagi keberadaan sumberdaya khususnya sumberdaya perikanan agar tetap lestari dan berkelanjutan, seperti pengelolaan daerah tangkapan, pengelolaan lingkungan perairan dan pengelolaan wilayah tempat tinggal nelayan serta pengembangan infrastruktur usaha budidaya. Sehingga diharapkan keberadaan infrastruktur dan lingkungan yang stabil serta baik akan mampu menciptakan kenyamanan dan ketentraman bagi kehidupan masyarakat.

Pengembangan Usaha Alternatif

Masyarakat nelayan sebenarnya mempunyai banyak waktu luang yang dapat dimanfaatkan selain usaha penangkapan ikan. Aktivitas penangkapan ikan yang mereka lakukan sangat tergantung pada musim angin. Aktivitas/intensitas penangkapan ikan yang tinggi terjadi pada musim ikan (*Peak Season*) dimana keadaan laut relatif tenang biasanya terjadi pada bulan April. Aktivitas sedang biasanya pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli; aktivitas berkurang terjadi pada musim kurang ikan (*Off Season*), biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai dengan Oktober. Aktivitas penangkapan ikan hampir terhenti sama sekali pada musim paceklik atau musim utara, yang biasanya terjadi pada bulan November sampai dengan Januari. Secara perhitungan sederhana, diperkirakan rata-rata waktu produktif nelayan dalam usaha

penangkapan ikan adalah dalam satu tahun, hanyalah sekitar 9 bulan dan dalam satu bulan hanya sekitar 20 hari.

Upaya untuk mengembangkan usaha alternatif selain usaha penangkapan ikan bagi nelayan sangat diperlukan dalam rangka menstabilkan dan meningkatkan pendapatan mereka. Usaha alternatif tersebut mulai dengan memanfaatkan waktu luang nelayan dan keluarganya sampai dengan menjadikan usaha alternatif tersebut sebagai mata pencaharian pokok sebahagian dari mereka.

Jenis-jenis usaha alternatif yang akan dikembangkan perlu mempertimbangkan minat masyarakat, ketersediaan bahan baku/sumberdaya alam, ketersediaan tenaga kerja dan peluang pasar (analisis teknis).

Strategi pengembangan dan peningkatan aspek pemasaran hasil perikanan

Kegiatan perikanan pada umumnya hanya terfokus pada kegiatan penangkapan dan pengolahan hasil. Aspek pemasaran seringkali terlupakan dan jarang diperhatikan, maka untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan dan meningkatkan kinerja para nelayan maka pengembangan dan peningkatan aspek pemasaran perlu dikembangkan melalui beberapa yaitu :

1. pengarahan kegiatan kelembagaan koperasi nelayan
2. peningkatan akses antar kelembagaan dan antar daerah bagi pemasaran hasil produksi perikanan.

Pengembangan dan peningkatan aspek pemasaran hasil perikanan dari kegiatan perekonomian masyarakat harus didukung oleh aspek pemasaran. Aspek ini merupakan aspek penting sebagai tujuan akhir dari hasil produksi yaitu sebagai penampung hasil-hasil produksi, sehingga diharapkan dari pelaksanaan strategi pengembangan dan peningkatan

aspek pemasaran mampu mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Berbagai rancangan strategi pengembangan bagi pengelolaan sumberdaya perikanan perlu dilaksanakan atas dukungan dan mengikutsertakan semua pihak sebagai *Stakeholders*. Secara rinci pelaksanaan pengelolaan sumberdaya perikanan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rencana Strategi Pengelolaan sumberdaya perikanan

Strategi	Kegiatan	Pelaksana	Sasaran	Luaran
Pembentukan dan Pembinaan Kelembagaan	Identifikasi potensi sumberdaya masyarakat Pembentukan kelompok usaha bersama setiap desa Suntikan modal kelompok usaha Penjadwalan pertemuan setiap kelompok usaha Penentuan diversifikasi usaha Pemberdayaan usaha budidaya Pengembangan kewirausahaan dan industri skala rumah tangga	Institusi teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Indragiri Hilir Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat	Masyarakat penerima (nelayan)	Kemandirian usaha Akses antar kelembagaan Peningkatan skala usaha
Penelitian, pelatihan dan pendampingan	Penelitian penilaian sosial ekonomi dan penilaian lingkungan Penelitian kehidupan beragama dan sikap masyarakat Pelatihan manajemen usaha kecil Pelatihan pengelolaan lingkungan Pelatihan dan pembinaan manajemen diri Pelatihan partisipatif	Lembaga Akademisi Lembaga Swadaya Masyarakat	Masyarakat Pelaksana Teknis	Penentuan potensi lokasi penerima program Peningkatan pengetahuan dan pengawasan Perubahan sikap

	Pendampingan pelaksanaan usaha dan pembinaan masyarakat Studi banding dan temu usaha nelayan			
Pengembangan Infrastruktur dan pengelolaan lingkungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat	Pembangunan Jeti dan Pelabuhan pendaratan ikan Pembangunan jalan antar desa Pengadaan sarana air bersih PAH dan Cool Box Pengawasan dan penataan daerah tangkapan Reboisasi dan konservasi mangrove Pembangunan pabrik es mini Pengadaan sarana pasca panen	Institusi teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Indragiri Hilir Masyarakat	Lokasi program Masyarakat	Peningkatan kapasitas infrastruktur Kenyamanan lingkungan
Pengembangan Usaha Alternatif	Budidaya perikanan Usaha kerupuk ikan Tambak udang Usaha terasi Beternak ayam, itik dan kambing Warung makanan Kedai harian Kedai alat penangkapan ikan Pembibitan mangrove	Institusi teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Indragiri Hilir Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat	Masyarakat penerima (nelayan)	Kemandirian usaha Peningkatan skala usaha
Pengembangan dan peningkatan aspek pemasaran hasil perikanan	Industri pasca panen Penjalinan kerjasama antar daerah Pengarahan kegiatan koperasi nelayan	Institusi teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Indragiri Hilir Masyarakat	Masyarakat	Peningkatan akses ekonomi masyarakat

Sumber : Analisis data primer

Monitoring dan Evaluasi Program

Evaluasi dilakukan dalam rangka mengevaluasi penerapan

rencana kegiatan yang telah disusun. Dari hasil analisis *stakeholders*, diperoleh gambaran bahwa masyarakat mendukung pengelolaan sumberdaya perikanan melalui

pengembangan masyarakat dan pengelolaan lingkungan namun dalam pelaksanaan tahap-tahap awal masih diperlukan pendampingan dari pihak lain seperti instansi-instansi teknis dan lembaga swadaya masyarakat. Monitoring dan evaluasi diperlukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dijalankan. Hal ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan dengan baik atau belum, apakah target suatu kegiatan telah tercapai atau belum.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Panglima Raja dilihat dari sumber mata pencaharian masyarakat pada umumnya mengandalkan usaha perikanan tangkap. Keadaan pendidikannya masih digolongkan dalam keadaan rendah, mayoritas masyarakatnya hanya berpendidikan pada tingkat sekolah dasar. Budaya masyarakat desa panglima raja pada umumnya budaya suku duano, kehidupan yang tergantung dengan laut, jalan pelantar dan berkajang, selain itu juga mereka mengadopsi budaya melayu pesisir hal ini terlihat dari kegiatan sosial kemasyarakatan yang pada umumnya adalah kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar nasional.

Strategi pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat di Desa Panglima Raja disusun dalam beberapa strategi hasil rumusan dari penelitian ini yaitu: (a) strategi Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan; (b) strategi Pendampingan, penelitian dan

pelatihan yang meliputi pembinaan kelembagaan dan kegiatan nelayan serta pembinaan mental spritual nelayan, kegiatan penelitian tentang penilaian sosial ekonomi, penelitian tentang kehidupan agama dan sikap masyarakat dalam pengelolaan pesisir yang bersumber dari kekuatan lokal; (c) strategi pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat; (d) strategi pengembangan usaha alternatif selain melakukan penangkapan; (e) strategi pengembangan dan peningkatan aspek pemasaran hasil perikanan yang meliputi kegiatan pengarahannya kegiatan kelembagaan koperasi nelayan, kegiatan peningkatan akses antar kelembagaan dan antar daerah bagi pemasaran hasil produksi perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen UP3K. 2000. Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Lasabuda Ridwan, 2003. Pengantar Falsafah Sains (PPS702) Program Pascasarjana/S3 Institut Pertanian Bogor. http://tumoutou.net/702_07134/ridwan_lasabuda.htm
- Maleong, L. J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rosdakarya. Bandung. 253 hal.
- Satria A. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta
- Yin. Robert K, 2003. Studi Kasus Desain dan Metode

(Terjemahan). Edisi Revisi,
Cet. 4. Penerbit PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

Wahyono, Ary *et.al.*, 2001.
Pemberdayaan Masyarakat
Nelayan. Penerbit PT. Media
Pressindo, Yogyakarta.